
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR JENIS ANGKUTAN KOTA UNTUK
MENINGKATKAN KESELAMATAN
PENUMPANG DI KOTA MEDAN**

Via Aulia Rahma¹, Tunggul Sihombing²
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹viaauliaaa@gmail.comjm

***Abstract:** Recognizing the importance of the role of transportation, road traffic and transportation must be arranged in a transportation system capable of realizing the availability of transportation according to the level of traffic demand and transportation services that are orderly, comfortable and smooth. Testing of motorized vehicles is a series of activities to test and or examine parts or components of motorized vehicles, trailers and attached carriages in the framework of fulfilling technical and road-worthiness requirements. Motor vehicle testing aims to protect the vehicle so that it does not contain unknown technical deficiencies that can cause a hazard. This study aims to determine the extent to which the implementation of the urban transportation type motorized vehicle testing policy to improve passenger safety in the city of Medan. By using qualitative research methods with a qualitative approach. The research location is at the Medan City Transportation Service. Apart from that, there are still service bureaus roaming around to help city transport drivers who don't have smartphones and don't understand the handling of motorized vehicle testing, so service bureaus are ready to help by exceeding payments. The results of the study show that the implementation of the motorized vehicle testing policy at the Medan City Transportation Service has not been maximized.*

***Keywords:** Implementatio; Public policy; Motor Vehicle Testing*

Abstrak: Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang mampu mewujudkan ketersediaan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman dan lancar. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk menjaga kendaraan agar tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota untuk meningkatkan keselamatan penumpang di Kota Medan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan. Selain itu, masih terdapat biro jasa yang berkeliaran untuk membantu para supir angkutan kota yang tidak memiliki smartphone dan tidak mengerti dalam pengurusan pengujian kendaraan bermotor, maka biro jasa siap membantu dengan melebihi pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Medan belum maksimal.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Pengujian Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan suatu Bangsa dan Negara. Pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu bidang transportasi. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Jadi dapat dikatakan transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain (dalam Andriansyah, 2014). Selain itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tinggi untuk menunjang aktivitas masyarakat. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang mampu mewujudkan ketersediaan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman dan lancar berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Dalam hal ini permasalahan pada kebijakan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota menggunakan variable-variabel dari teori model implementasi Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan sektor publik terutama melihat implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota untuk meningkatkan keselamatan penumpang di Kota Medan yang dapat dilihat dari kategorisasi Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Keanekaragaman jenis kendaraan dan penambahan jumlah kendaraan yang semakin banyak seperti angkutan kota di setiap daerah memiliki jumlah yang banyak seperti pada tahun 2019-2020

Kota Medan saat ini memiliki jumlah angkutan kota sekitar 8.148, akan tetapi hal itu tidak didukung dengan pelebaran luas jalan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan yang mengakibatkan banyaknya terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan tingginya tingkat polusi.

Dampak yang paling merugikan adalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang dapat dilihat berdasarkan data peneliti dari Satlantas Polrestabes Medan dengan jumlah kecelakaan khusus angkutan kota pada tahun 2019 sebanyak 59 dan pada tahun 2020 sebanyak 51. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan disebabkan karena human error yang berarti pengemudi tidak sabar dalam mengemudikan kendaraannya dan ada technical error yang berarti kondisi teknisnya tidak layak jalan, seperti rem tidak berfungsi. Terjadinya hal-hal tersebut haruslah dikurangi untuk menjaga kejesahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan keselamatan pengguna kendaraan bermotor khususnya pada angkutan kota yang mengangkut penumpang.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang bertujuan untuk menjaga kendaraan agar tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya.

UPTD PKB Pinang Baris merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Perhubungan Kota Medan yang dibentuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor agar transportasi umum yang tersebar di seluruh jalan Kota Medan bisa memiliki kondisi yang layak jalan. Berdasarkan data peneliti, jumlah pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2019 semester 1 bulan januari-juni sebanyak 3363 dan semester 2 bulan juli-desember sebanyak 3833 sedangkan pada tahun 2020 semester 1 bulan januari-juni sebanyak 2174 dan semester 2 bulan juli-desember sebanyak 2061.

Terdapat selisih disetiap semesternya karena angkutan kota yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di semester 1 dengan rata-rata 68% dan 59% belum tentu melakukan uji kelayakan di semester 2 dengan rata-rata 77% dan 56% begitu juga sebaliknya. Artinya, masih banyak angkutan kota yang tidak sesuai standar dapat beroperasi di jalan raya. Hal ini jika dibiarkan akan merugikan pengguna angkutan kota karena kendaraan tersebut tidak sesuai standar yang tidak memperhatikan kondisi kendaraannya yang membahayakan keselamatan pengguna angkutan kota khususnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota untuk Meningkatkan Keselamatan Penumpang di Kota Medan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti diharapkan dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota untuk Meningkatkan Keselamatan Penumpang di Kota Medan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99) yaitu Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi politik dan sikap pelaksana.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamatkan di Jalan Pinang Baris, Lalang pada tanggal 16 Februari – 20 Desember 2021. Untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah

yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling dalam menentukan informan penelitiannya.

Dimana informan penelitian tersebut adalah Kepala Bidang Saprang Angkt. Darat, Kasi Pengujian Sarana, PH. Kasi Angkutan Jalan, Kepala Bidang dan Pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Pinang Baris, Kepala Divisi Keuangan & Perencanaan Bank Sumut, Direksi Perusahaan Angkutan Kota PT. Mekar Jaya, Supir Angkutan Kota, dan Penumpang Angkutan Kota.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016:101). Teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai tanpa adanya manipulasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif pada konsep Miles dan Huberman (2007:15) yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan disajikan analisis data, yaitu penyusunan secara sistematis data yang telah dihimpun oleh peneliti lapangan baik itu wawancara, observasi lapangan, dan data sekunder, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit dan menyusunnya ke dalam pola sehingga dapat dipahami baik itu oleh peneliti sendiri maupun orang lain sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan akan fenomena atau permasalahan yang diteliti dan diamati.

Dengan demikian untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota Untuk Meningkatkan Keselamatan Penumpang Di Kota Medan maka dapat

dilihat dari kategorisasi Van Meter dan Van Horn yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar regulasi yang di jadikan pedoman oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Nomor 551/107 Tahun 2017 yang berisi tentang standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor. SOP yang dimiliki UPT PKB Pinang Baris yang terbagi menjadi standar teknis dan standar laik jalan. Standar teknis kendaraan adalah standar yang harus dipenuhi secara teknis oleh kendaraan bermotor dalam hal ini adalah angkutan kota yang masih beroperasi di kawasan Kota Medan sedangkan standar laik jalan adalah standar minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait sasaran dan standar, peneliti melihat bahwa masih terdapat pemilik/ supir angkutan kota yang menjadi sasaran pengurus pengujian masih sebagian kecil yang mengetahui bagaimana proses pengurusan pengujian kendaraan bermotor dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai standar yang harus diikuti untuk berjalannya proses pengurusan pengujian kendaraan bermotor secara efektif tanpa ada perantara. Serta terdapat beberapa SOP terkait standar teknis saat pengecekan kendaraan dibalai yang dilewati, seharusnya 9 alur dipotong menjadi 4 alur dengan alasan banyak memakan waktu bila mengikuti alur dalam SOP sehingga

tidak sesuai dengan SOP yang terapkan.

Dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan pengujian kendaraan bermotor tersebut belum menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pengurusan pengujian kendaraan bermotor secara online sehingga masih ditemukan beberapa tahapan yang melakukan kegiatan manual, hal tersebut mengakibatkan proses pencetakan hasil uji masih membutuhkan waktu 3-5 jam sehingga tidak terlaksana sesuai dengan SOP pengujian kendaraan bermotor. Hadirnya sistem online yang berupa website Ngekir online secara garis besar semua prosesnya dilakukan secara komputerisasi dan pengawasan kendaraan dijalan dilakukan secara online oleh petugas Dallops serta hasil pengawasan juga sudah terintegrasi dengan Dishub dan Kemenhub.

Sumber daya merupakan faktor utama dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, sumber dana, dan fasilitas yang menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kantor UPT PKB Pinang Baris memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 38 orang. Lalu adanya anggaran yang diberi Pemko Medan sejumlah 1.7 M untuk pengadaan smart card, 400 jt untuk pemeliharaan alat uji, dan 50 jt untuk kalibrasi alat uji, karena tanpa adanya ketersediaan anggaran yang memadai maka pelaksanaan dari sebuah kebijakan tidak dapat dilakukan. Dan fasilitas dari segi yang melayani seperti meja, kursi, dan ATK sedangkan dari segi yang dilayani seperti ruang tunggu untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat sudah terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait sumber daya, peneliti melihat bahwa adanya rencana diklat Dasar, I, II, dan III khusus untuk staff dalam Balai pengujian yang akan direkomendasikan oleh pihak Dinas

Perhubungan untuk memiliki pendidikan khusus yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Bali, Solo, dan Tegal. Lalu dalam sumber daya finansial pada pengujian kendaraan bermotor yang diusulkan Dinas Perhubungan Kota Medan kepada Pemko Medan dan apabila disetujui maka akan keluar yang namanya DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) untuk pengadaan smartcard, kalibrasi, dan pemeliharaan alat uji yang akan diserahkan di Kemenhub RI dan untuk alat uji UPT PKB di Pinang Baris sudah memiliki akreditasi B dari beberapa UPT PKB yang lain, hal tersebut dikarenakan pihak Kemenhub RI bekerja sama dengan CV. Sapta Penida saat menangani kalibrasi atau penetralan alat uji yang dilakukan 5 tahun sekali. Dan terkait gedung balai pengujian terdapat 2 jalur, namun dalam pelaksanaannya hanya dibuka 1 jalur saja sehingga menyebabkan antrian yang panjang.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sumber daya manusia yaitu pegawai/staf pada UPT PKB Pinang Baris dan pengurus, tetapi dari awal pelaksanaan pengujian secara online, pihak UPT PKB Pinang Baris tidak pernah melakukan bimbingan teknis secara formal kepada pegawai dan pengurus. Sumber daya finansial yang telah memadai untuk kegunaan penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung terutama alat uji untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota ini berjalan dengan efektif.

Hal yang terakhir adalah sumber daya fasilitas yang tersedia jaringan internet untuk berjalannya pelayanan pengujian tetapi kualitas jaringan yang terkadang tidak baik masih menjadi masalah yang terjadi dan beberapa dari masyarakat mengeluhkan kuantitas yang disediakan oleh pihak pelaksana. Serta alat uji yang disediakan oleh pihak pelaksana untuk selalu direvitalisasi dan dirawat agar pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota berjalan dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Koordinasi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Pinang Baris dilakukan oleh beberapa pihak, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, Perusahaan Angkutan Kota, dan Bank Sumut sebagai metode sistem pembayaran online. Lalu dari segi sosialisasinya peneliti melihat masih banyak masyarakat yg baru mengetahui tentang pengurusan secara online yang sudah launching dari tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi ngekir online sehingga hal tersebut belum bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaan implementasi pkb. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan dengan masyarakat tidak dilakukan dalam bentuk formal hanya dalam bentuk penginformasian saat masyarakat datang ke kantor upt pkb pinang baris.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait komunikasi antar badan pelaksana, peneliti melihat bahwa masih terdapat kendala yang dialami oleh pegawai saat mengecek data kendaraan seperti cek hasil uji kendaraan melalui website Ngekir online, terkadang data yang diinput dinyatakan tidak valid, sedangkan data tersebut telah benar, sehingga pengurusan pengujian kendaraan bermotor akan lebih membutuhkan waktu lebih dari yang biasanya.

Dapat disimpulkan bahwa pengenalan Ngekir online terhadap masyarakat belum terlaksana dengan baik. Keberadaan Ngekir online tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Kota Medan. Hal tersebut yang menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui keberadaan Ngekir online, dengan demikian sosialisai yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan kepada pegawai sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal bimbingan teknis

secara khusus tidak ada dilakukan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dapat mempengaruhi komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal tersebut untuk melihat tugas pegawai masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya pada instansi. arakteristik badan pelaksana harus ada proedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai ukuran dan tujuan yang ingin dicapai. Pengujian kendaraan bermotor salah satu syarat administrasi dalam beroperasi, jika angkutan kota tidak memilikinya maka ada badan pelaksana yang akan mengeceknya.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait karakteristik agen pelaksana, peneliti melihat bahwa salah satunya seperti menertibkan angkutan kota dan mewajibkan untuk memiliki pengujian kendaraan bermotor yang layak jalan sebagai surat kelengkapan saat beroperasi dijalanan. Sehingga dengan memilikinya, pengemudi akan tenang saat membawa penumpang. Dengan dilakukannya razi rutin, pengemudi agar lebih disiplin terhadap peraturan demi keamanan. Salah satu bentuk karakteristik agen pelaksana kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan angkutan kota yang tidak memiliki surat kelengkapan saat beroperasi salah satunya dengan mengadakan razia rutin agar menekankan pada pengemudi untuk taat terhadap peraturan yang berlaku demi kenyamanan masyarakat pengguna angkutan kota.

Dapat disimpulkan bahwa sistem online berupa proses penerbitan hasil uji

dilakukan menggunakan komputer, untuk menunjang kemampuan pegawai/staff dalam menjalankan tugas. Dan tidak ada diberikan secara khusus pegawai yang mengatur sistem pengurusan secara online hanya pegawai yang secara manual dari UPT PKB Pinang Baris sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan sistem Ngekir online tersebut, karena pengenalan sistem pengujian yang secara online tentu saja bukan hanya kepada para pegawai melainkan kepada masyarakat sebagai pengurus pengujian kendaraan bermotor.

Sikap Para Pelaksana/Disposisi

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahaman terhadap kebijakan, serta ingetritas disposisi implementor yaitu presensi nilai yang dimiliki oleh implementor. disposisi merupakan watak dari para pelaksana kebijakan dalam menyikapi suatu kebijakan dan merupakan faktor yang tidak dapat dilupakan. Disposisi implementor dapat dilihat dari pemahaman para pelaksana dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan selalu berada pada loket pengaduan yang disediakan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait sikap para pelaksana, peneliti melihat bahwa proses penerbitan hasil uji sudah dilakukan dengan berbagai tahap, tetapi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan aplikasi Ngekir online tidak sedikit dari mereka menyerahkan pengurusan pengujian kendaraan bermotor kepada pegawai/staff hal tersebut dapat diketahui masih terdapat masyarakat yang masih perlu diberi pendampingan dalam penggunaan website Ngekir online. Pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang kurang paham merupakan salah satu upaya dari pihak pemerintah agar proses pengurusan pengujian dapat dilakukan dengan mudah dan masyarakat juga lebih terbantu. Namun hal tersebut menambah

pekerjaan pada pegawai dan aplikasi ngekir online berarti belum bisa dikatakan efektif dan berguna baik bagi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai menerima dengan baik diterapkannya sistem online melalui website Ngekir online dan tidak ada terjadi penolakan dari setiap pihak pelaksana serta seluruh implementor selalu mendukung berjalannya sistem online pengujian kendaraan bermotor.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga ikut mempengaruhi keberhasilan program. Ketigannya saling berkesinambungan dan mempengaruhi, jika salah satu faktor bermasalah maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Lingkungan sosial yang sudah membuat pengurus berkembang untuk mengerti sistem online seperti dengan adanya pembayaran secara online E-Money, QRIS dan Qren sehingga pengujian berbasis elektronik menjadi sangat cepat atau efisien. Lalu terkait lingkungan ekonomi sudah memiliki harga retribusi yang sesuai dengan tingkat pendapatan penduduk di Kota Medan. Dan terkait lingkungan politik yang merupakan hal penting agar terciptanya pelayanan yang tertib pada UPT PKB namun kenyataannya masih beredar

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait lingkungan sosial memiliki faktor yang sangat berpengaruh yaitu terdapat 2 pandangan seperti bagi masyarakat yang paham akan merasa terbantu karena proses pengujian kendaraan bermotor menjadi lebih mudah sebab bisa diakses dimana saja dan kapan saja tidak harus mengikuti jam kerja, sedangkan berbeda dengan masyarakat

yang tidak paham maka tidak merasakan dampak yang menguntungkan dengan diterapkannya pengujian kendaraan bermotor secara online. Lalu lingkungan ekonomi terdapat kendala seperti beberapa pengurus tidak memiliki smartphone untuk digunakan dalam melakukan pembayaran retribusi yang sudah online. Lalu lingkungan sosial memiliki masalah yang timbul pada lingkungan politik di sekitaran pengujian kendaraan bermotor ini masih terdapat calo-calo yang beredar ketika kita ingin melakukan pengujian, hal ini membuat beberapa pengurus merasa tidak nyaman karena selalu ditawarkan untuk melaksanakan pengujian melalui calo itu.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik, berpengaruh besar dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota seperti lingkungan sosial, terdapat dua pandangan berbeda yang dialami masyarakat seperti yang paham dengan website online seperti Ngekir online akan sangat terbantu tetapi bagi masyarakat yang tidak memahami penggunaan website Ngekir online maka mereka merasa dipersulit.

SIMPULAN

Dengan adanya Standar dan Sasaran bisa menciptakan pelayanan pkb yang lebih efektif dan efisien karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui alur pengurusan pkb baik secara manual maupun online. Sumber Daya Manusia yang sudah didukung dengan adanya bimbingan teknis dan pelatihan diklat untuk pengujian, Sumber Daya Keuangan sudah cukup memadai dengan penyediaan fasilitas yang sudah sesuai dengan anggaran, dan Infrastruktur sudah cukup baik khususnya pada alat uji yang sudah terakreditasi B akan tetapi pada jaringan internet masih membutuhkan penyediaan jaringan yang cepat.

Komunikasi Antar Organisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas

Perhubungan Kota Medan sudah terlaksana dengan baik seperti adanya koordinasi dengan pihak bersangkutan seperti kepolisian, perusahaan angkot, dan bank sumut. Karakteristik Badan Pelaksana untuk pihak yang terlibat sudah dibagikan wewenangnya sesuai tugas dan fungsinya seperti menertibkan dan mewajibkan untuk memiliki surat kelayakan jalan khususnya pada angkutan kota. Disposisi pelaksana dari UPT sudah memberikan respon dan sikap secara baik, namun masih banyak masyarakat yang blm mengetahui pkb yang sudah sistem online sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan pegawai dan masyarakat tidak bisa secara mandiri dalam pelaksanaan pkb tersebut.

Lingkungan Sosial terdapat 2 pandangan yaitu bagi masyarakat yang paham adanya ngekir online akan merasa terbantu karena bisa diakses dimana dan kapan saja, namun berbeda dengan masyarakat yang tidak paham dengan pkb secara online, mereka tidak merasakan dampak yang menguntungkan. Lingkungan Ekonomi untuk retribusi sudah sesuai dengan pendapatan masyarakat di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV Alfabeta: Bandung, hlm.141-144.
- Andriansyah, Manajemen Trnasportasi Dalam Kajian dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. MoestopoBeragama, Jakarta, 2014, hlm.1.
- Miles, Mathew B. dan Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).Yogyakarta: Pustaka, hlm.99.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 13
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo, hllm.146-147.
- Wirawan. 2015. Evaluasi: Teori, Metode, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press, hlm.156-157
- Yazid, Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi, EKONISIA, Yogyakarta, 2003, hal.102.